JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BANGSA
e-ISSN : 2987- 0135
Volume 4, No. 9, Tahun 2026
https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/index

Pendampingan Penilaian Mandiri dan Penyusunan Rencana Aksi Environmental, Social, and Governance (ESG) bagi UMKM di Kelurahan 3 Ilir Palembang

Mega Silvia[1], Emilia Gustini[2], Septiani Fransisca[3], Putri Erika Syahrani [4], Okta Anna Reza[5], Anisa Padila[6]

[1,2,3,4,5,6] *Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Darma, Indonesia*

Received : 05 November 2026, Revised : 13 November 2026, Published : 19 November 2026

Corresponding Author
Nama Penulis: Mega Silvia
E-mail: mega.silvia@binadarma.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kemampuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengintegrasikan prinsip environmental, social, and governance (ESG) ke dalam pengelolaan usaha di Kelurahan 3 Ilir, Kota Palembang. Kegiatan dilaksanakan pada 10 Agustus–10 September 2026 dengan melibatkan 30 pelaku UMKM melalui empat sesi penyuluhan, pelatihan partisipatif, pendampingan pencatatan transaksi, dan penilaian mandiri. Materi mencakup efisiensi sumber daya dan pengelolaan limbah, tanggung jawab terhadap pekerja dan konsumen, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha. Evaluasi dilakukan menggunakan daftar periksa 15 indikator ESG, penelaahan lembar pencatatan transaksi, dan penyusunan rencana aksi pada tiga dimensi ESG. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan median skor penilaian mandiri ESG dari 6 menjadi 12. Kemampuan peserta dalam menyusun rencana aksi meningkat dari 6,7% menjadi 90,0%, sedangkan kemampuan membuat catatan transaksi berlabel ESG meningkat dari 10,0% menjadi 83,3%. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian penilaian mandiri dan keterampilan praktis peserta dalam mengidentifikasi kondisi usaha, mendokumentasikan aktivitas terkait ESG, serta merumuskan prioritas perbaikan yang realistis untuk mendukung pengelolaan usaha berkelanjutan.

Kata kunci - *environmental, social, and governance, keberlanjutan usaha, pendampingan, penilaian mandiri, UMKM*

Abstract

This community service activity aimed to strengthen the capacity of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) to integrate environmental, social, and governance (ESG) principles into business management in 3 Ilir, Palembang, Indonesia. Conducted from 10 August to 10 September 2026, the programme involved 30 MSME participants through four sessions comprising educational activities, participatory training, transaction-recording assistance, and self-assessment. The materials addressed resource efficiency and waste management, responsibilities towards workers and consumers, and transparency and accountability in business management. Evaluation employed a 15-item ESG checklist, transaction-record reviews, and the preparation of action plans covering three ESG dimensions. The results showed an increase in the median ESG self-assessment score from 6 to 12. The proportion of participants capable of preparing ESG action plans increased from 6.7% to 90.0%, while the ability to maintain ESG-labelled transaction records improved from 10.0% to 83.3%. These findings indicate improvements in participants' self-assessment outcomes and practical skills in documenting ESG-related activities and identifying feasible priorities for more sustainable business management.

Keywords - *business sustainability, environmental, social, and governance, mentoring, MSMEs, self-assessment*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

How To Cite : *Silvia, M., Gustini, E., Fransisca, S., Syahrani, P. E., Reza, O. A., & Padila, A. (2026). Pendampingan Penilaian Mandiri dan Penyusunan Rencana Aksi Environmental, Social, and Governance (ESG) bagi UMKM di Kelurahan 3 Ilir Palembang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 4(9), 5724 - 5737. https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i9.5564*
Copyright *©2026 Mega Silvia, Emilia Gustini, Septiani Fransisca, Putri Erika Syahrani, Okta Anna Reza, Anisa Padila*

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga berhadapan dengan tuntutan untuk menjalankan usaha secara bertanggung jawab. Dalam praktik sehari-hari, keberlanjutan tidak selalu membutuhkan pelaporan kompleks. Kebutuhan mendasarnya adalah kemampuan pemilik usaha mengenali dampak operasional, memperhatikan kondisi tenaga kerja dan konsumen, serta mempertahankan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Tinjauan sistematis Zaman et al. (2025) menunjukkan bahwa keberlanjutan UMKM perlu dipahami melalui hubungan antara praktik konkret dan kinerja usaha, bukan sekadar penyampaian komitmen normatif.

Kerangka environmental, social, and governance (ESG) menyediakan sudut pandang terintegrasi untuk menelaah aktivitas tersebut. Dimensi lingkungan menyangkut penggunaan energi dan air, kemasan, bahan baku, dan pengelolaan limbah; dimensi sosial mencakup keselamatan pekerja, hubungan dengan pelanggan, serta kontribusi kepada komunitas; sedangkan dimensi tata kelola terkait dengan pencatatan transaksi, keterbukaan informasi, kepatuhan, dan pengambilan keputusan yang etis. Telaah Setyaningsih et al. (2024) serta Cicchini et al. (2024) menggarisbawahi bahwa keterbatasan kapasitas dan kesesuaian instrumen menjadi isu penting bagi pelaporan keberlanjutan UMKM.

Kapasitas untuk menerapkan ESG dipengaruhi oleh literasi pemilik usaha, sumber daya internal, dan tekanan pemangku kepentingan. Shari et al. (2024) mengidentifikasi kontribusi kesadaran, pengetahuan, dan budaya organisasi terhadap praktik ESG UMKM di Malaysia. Sementara itu, Castilla-Polo et al. (2025) membahas nilai bisnis pelaporan keberlanjutan dari perspektif akademisi dan konsultan, yang memperkuat kebutuhan pendekatan edukatif dan dapat dioperasionalkan.

Penelitian mengenai UMKM juga memperingatkan bahwa tindakan keberlanjutan tidak otomatis diikuti kemampuan mengomunikasikan atau mencatatnya. Galli et al. (2024) membahas ketidaksesuaian antara praktik dan pelaporan, sedangkan Ortiz-Martinez & Marin-Hernandez (2024) menelaah karakteristik informasi keberlanjutan yang diungkapkan UMKM Eropa. Karena itu, pendampingan sebaiknya menghasilkan bukti praktik yang sederhana, terukur, dan proporsional terhadap ukuran usaha, bukan sekedar pemahaman konseptual.

Kebutuhan pendekatan keberlanjutan yang sesuai dengan karakteristik UMKM juga diperkuat oleh Martins et al. (2022), yang mengidentifikasi beragam aspek keberlanjutan dalam usaha kecil dan menengah. de Souza et al. (2026) selanjutnya menekankan pentingnya penilaian keberlanjutan yang multidimensi dan mempertimbangkan konteks usaha. Dari perspektif dokumentasi, Guerrero-baena et al. (2024) membahas faktor yang mendorong UMKM menghasilkan laporan keberlanjutan, sedangkan Sendawula et al. (2024) mengidentifikasi hambatan berupa keterbatasan pengetahuan, keahlian, dan sumber daya. Literatur tersebut memperkuat relevansi pendampingan yang menggabungkan penilaian mandiri, pencatatan transaksi, dan penyusunan rencana aksi ESG melalui instrumen yang sederhana.

Penerapan ESG pada tingkat UMKM memerlukan pendekatan yang sesuai dengan skala usaha dan kemampuan pengelolaan administrasi. Penyuluhan saja belum cukup apabila peserta belum memiliki sarana untuk menilai praktik yang telah dijalankan, menentukan aspek yang perlu ditingkatkan, dan mendokumentasikan tindakan perbaikan. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian dapat dipadukan dengan latihan penilaian mandiri, pengelompokan aktivitas usaha berdasarkan dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta penyusunan target operasional yang sederhana.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendekatan ini membantu pelaku usaha menghubungkan prinsip keberlanjutan dengan keputusan sehari-hari secara lebih konkret.

Di Kelurahan 3 Ilir, Kota Palembang, penguatan kapasitas UMKM dalam pengelolaan usaha yang berkelanjutan menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan pengabdian difokuskan pada praktik yang dekat dengan aktivitas peserta, antara lain penghematan energi dan air, pengelolaan limbah, keselamatan dan pelayanan konsumen, pencatatan keuangan, serta tata kelola administrasi usaha. Setiap aspek diperkenalkan melalui contoh yang relevan agar peserta dapat mengenali indikator ESG yang dapat diterapkan secara bertahap sesuai kondisi usahanya.

Kesenjangan antara kondisi awal mitra dan praktik ESG yang diharapkan terlihat dari keterbatasan kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan penilaian mandiri, mendokumentasikan aktivitas usaha yang berkaitan dengan keberlanjutan, serta menyusun rencana aksi yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Berdasarkan penilaian awal terhadap 30 pelaku UMKM di Kelurahan 3 Ilir, median skor penerapan ESG berada pada angka 6 dari maksimum 15, dengan 22 peserta (73,3%) termasuk kategori merah dan 8 peserta (26,7%) kategori kuning. Selain itu, hanya 3 peserta (10,0%) yang mampu membuat catatan transaksi berlabel ESG dan 2 peserta (6,7%) yang mampu menyusun rencana aksi pada ketiga dimensi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan awal mitra dan praktik ESG yang diharapkan, yaitu kemampuan mengidentifikasi kondisi keberlanjutan usaha secara mandiri, menghubungkan transaksi dengan aspek ESG, serta merencanakan perbaikan yang terukur dan sesuai dengan kapasitas usaha.

Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada pengintegrasian tiga instrumen praktis dalam satu rangkaian pendampingan, yaitu penilaian mandiri menggunakan 15 indikator ESG, pencatatan transaksi dengan penandaan dimensi Environmental (E), Social (S), dan Governance (G), serta penyusunan rencana aksi berbasis tindakan prioritas, indikator pemantauan, dan bukti pendukung. Berbeda dari pendekatan yang hanya menekankan penyampaian konsep keberlanjutan, kegiatan ini menghubungkan hasil penilaian kondisi usaha dengan latihan dokumentasi transaksi dan perencanaan tindakan perbaikan yang dapat diterapkan dalam operasional sehari-hari. Pendekatan tersebut sejalan dengan Setyaningsih et al. (2024) dan Cicchini et al. (2024) yang menyoroti pentingnya kesesuaian instrumen keberlanjutan dengan keterbatasan kapasitas UMKM. Dengan demikian, kontribusi kegiatan ini bukan terletak pada pengembangan konsep ESG yang baru, melainkan pada penerapan pendekatan pendampingan terintegrasi yang sederhana, terukur, dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM di Kelurahan 3 Ilir.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam melakukan penilaian mandiri ESG, mengelompokkan transaksi yang berkaitan dengan dimensi ESG, dan menyusun rencana aksi perbaikan usaha. Kegiatan juga diarahkan untuk memperkuat kebiasaan dokumentasi dan evaluasi sederhana sebagai dasar pengelolaan usaha yang lebih efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan 3 Ilir, Kota Palembang, pada 10 Agustus hingga 10 September 2026, dengan melibatkan 30 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan dilaksanakan melalui empat sesi penyuluhan dan pendampingan yang mencakup pengenalan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG), penilaian mandiri, pelatihan pencatatan transaksi berbasis ESG, serta penyusunan rencana aksi keberlanjutan usaha. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang menggabungkan penyampaian materi, diskusi interaktif, latihan praktik, dan evaluasi. Materi dan metode pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik usaha peserta agar prinsip ESG dapat diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM di Kelurahan 3 Ilir, Kota Palembang, yang menjadi mitra dalam pelaksanaan pendampingan ESG. Pemilihan peserta diarahkan pada pelaku usaha yang

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

terlibat langsung dalam pengelolaan operasional dan administrasi usaha sehingga materi penilaian mandiri, pencatatan transaksi, dan penyusunan rencana aksi dapat dikaitkan dengan aktivitas usaha masing-masing. Sebanyak 30 pelaku UMKM mengikuti kegiatan pendampingan dan menjadi peserta evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahapan utama, yaitu pemetaan kondisi awal, penyuluhan dan pelatihan, pendampingan praktik, serta evaluasi akhir. Pada tahap awal, tim pengabdian mengidentifikasi kondisi operasional UMKM dan melakukan penilaian mandiri menggunakan 15 indikator ESG untuk memperoleh gambaran awal mengenai penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Tahap berikutnya dilakukan melalui penyuluhan mengenai prinsip ESG, pengelolaan sumber daya, tanggung jawab terhadap pekerja dan konsumen, serta transparansi pengelolaan usaha. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan pengelompokan transaksi berdasarkan dimensi ESG dan pendampingan penyusunan rencana aksi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UMKM. Pada tahap akhir, peserta melakukan penilaian mandiri kembali, sedangkan tim pengabdian mengevaluasi kelengkapan catatan transaksi dan rencana aksi yang telah disusun. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan secara bertahap sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan ESG pada UMKM

Sesi	Fokus Kegiatan	Keluaran/Bukti yang Diperiksa
1	Pemetaan kondisi usaha dan pengenalan tiga dimensi ESG	Profil usaha dan lembar penilaian mandiri awal
2	Penyuluhan prinsip ESG dan pelatihan identifikasi praktik lingkungan, sosial, serta tata kelola	Lembar identifikasi praktik ESG dan hasil diskusi peserta
3	Pelatihan pencatatan transaksi berbasis ESG dan pendampingan penyusunan rencana aksi	Lembar pencatatan transaksi dan draf rencana aksi ESG
4	Evaluasi akhir, peninjauan hasil pendampingan, dan penyusunan tindak lanjut	Lembar penilaian akhir, rencana aksi final, dan umpan balik peserta

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan instrumen penilaian mandiri yang terdiri atas 15 indikator Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan pilihan jawaban "Ya" dan "Tidak". Indikator tersebut mencakup praktik pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola usaha yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat penerapan prinsip ESG pada masing-masing UMKM. Setiap jawaban "Ya" diberikan skor 1, sedangkan jawaban "Tidak" diberikan skor 0, sehingga skor total setiap peserta berada pada rentang 0–15. Hasil penilaian dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu merah (0–7), kuning (8–12), dan hijau (13–15). Pengelompokan skor ke dalam kategori merah (0–7), kuning (8–12), dan hijau (13–15) digunakan sebagai klasifikasi operasional untuk memudahkan peserta memahami capaian penilaian mandiri dan menentukan prioritas pendampingan. Kategori merah menggambarkan pemenuhan kurang dari setengah indikator, kategori kuning menunjukkan pemenuhan sebagian besar indikator tetapi masih memerlukan perbaikan, sedangkan kategori hijau menunjukkan pemenuhan sedikitnya 13 dari 15 indikator. Batas kategori tersebut digunakan sebagai acuan praktis dalam kegiatan pendampingan dan tidak dimaksudkan sebagai standar sertifikasi atau pemeringkatan ESG yang berlaku secara umum. Penilaian dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan untuk mengidentifikasi perubahan capaian penilaian mandiri ESG peserta. Selain itu, evaluasi mencakup kemampuan peserta dalam menyusun rencana aksi pada ketiga dimensi ESG dan membuat catatan transaksi yang dilengkapi keterangan ESG. Kemampuan menyusun rencana aksi dievaluasi melalui pemeriksaan dokumen yang dihasilkan peserta dengan memperhatikan keberadaan tindakan prioritas, indikator pemantauan, dan bukti pendukung pada masing-masing dimensi Environmental, Social, dan Governance. Ketiga komponen tersebut digunakan sebagai dasar untuk menelaah kelengkapan dan keterukuran rencana aksi. Peserta dikategorikan mampu menyusun rencana aksi apabila dokumen yang dibuat mencakup ketiga

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

dimensi ESG beserta komponen utama yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dan pemantauan tindakan perbaikan usaha. Instrumen penilaian mandiri yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini disajikan secara lengkap pada Tabel 2.

Instrumen penilaian mandiri disusun dengan mengadaptasi Buku Panduan ESG untuk UMKM: Langkah Mudah untuk Membangun Bisnis Hijau dan Bertanggung Jawab (Reza & Silvia, 2025), kemudian dioperasionalkan ke dalam 15 pertanyaan dengan pilihan jawaban "Ya" dan "Tidak". Indikator tersebut mencerminkan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola yang relevan dengan aktivitas operasional UMKM, seperti pengelolaan sumber daya dan limbah, tanggung jawab terhadap pekerja dan pelanggan, keteraturan pencatatan keuangan, serta transparansi usaha. Instrumen digunakan sebagai alat evaluasi praktis dalam kegiatan pendampingan, bukan sebagai instrumen pengukuran ESG yang telah terstandardisasi secara luas. Oleh karena itu, hasil penilaian diinterpretasikan sebagai gambaran capaian penerapan indikator ESG berdasarkan jawaban peserta dalam konteks kegiatan pengabdian.

Tabel 2. Daftar Periksa 15 Indikator Penilaian Mandiri Penerapan ESG pada UMKM

No.	Indikator penilaian mandiri ESG	Ya	Tidak
1	Apakah usaha Anda menggunakan bahan baku lokal/ramah lingkungan?	☐	☐
2	Apakah Anda sudah rutin mencatat pemasukan dan pengeluaran usaha?	☐	☐
3	Apakah usaha Anda sudah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai?	☐	☐
4	Apakah usaha Anda melakukan penghematan energi?	☐	☐
5	Apakah usaha Anda mengelola limbah produksi, misalnya memilah sampah atau mendaur ulang?	☐	☐
6	Apakah karyawan mendapatkan pelatihan atau kesejahteraan yang layak?	☐	☐
7	Apakah usaha Anda ikut berkontribusi pada kegiatan masyarakat?	☐	☐
8	Apakah Anda menerapkan keterbukaan harga dan transparansi usaha?	☐	☐
9	Apakah Anda membayar kewajiban pajak atau retribusi sesuai aturan?	☐	☐
10	Apakah Anda menjaga lingkungan sekitar tempat usaha agar tetap bersih dan tertata?	☐	☐
11	Apakah Anda memiliki kebijakan atau nilai usaha yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan?	☐	☐
12	Apakah Anda melakukan evaluasi rutin terhadap keuangan dan operasional usaha untuk memastikan keberlanjutan bisnis?	☐	☐
13	Apakah usaha Anda menggunakan teknologi atau alat yang hemat energi dan ramah lingkungan?	☐	☐
14	Apakah Anda melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan atau memberi ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat?	☐	☐
15	Apakah usaha Anda menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan menindaklanjuti masukan atau keluhan mereka dengan profesional?	☐	☐

Sumber: Diadaptasi dari Reza & Silvia (2025).

Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif menggunakan frekuensi, persentase, serta median dan rentang minimum–maksimum skor ESG peserta. Frekuensi dan persentase digunakan untuk menggambarkan distribusi kategori ESG, kemampuan menyusun rencana aksi, dan keterampilan pencatatan transaksi berbasis ESG. Sementara itu, median dan rentang minimum–maksimum digunakan untuk menggambarkan distribusi skor penilaian mandiri sebelum dan sesudah kegiatan. Perbandingan hasil kedua pengukuran tersebut digunakan untuk mengevaluasi perubahan capaian peserta setelah mengikuti pendampingan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menilai ketercapaian kegiatan dan mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut dalam mendukung penerapan ESG secara berkelanjutan pada UMKM.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pelatihan pencatatan transaksi berbasis ESG dilakukan menggunakan format sederhana yang mencakup lima komponen utama, yaitu tanggal, jenis transaksi, pemasukan, pengeluaran, dan keterangan ESG. Peserta diberikan pendampingan dalam mengidentifikasi serta mengelompokkan transaksi berdasarkan tiga dimensi, yaitu Environmental (E), Social (S), dan Governance (G). Pengelompokan tersebut dilakukan melalui latihan pencatatan transaksi yang berkaitan dengan efisiensi energi dan pengelolaan limbah, keselamatan kerja dan tanggung jawab sosial, serta transparansi dan administrasi keuangan usaha. Setiap transaksi dicatat satu kali dalam catatan keuangan, sedangkan keterangan ESG digunakan sebagai informasi tambahan untuk mengidentifikasi kontribusi aktivitas usaha terhadap praktik keberlanjutan. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan peserta dalam melakukan pencatatan yang sistematis, mudah dipahami, dan dapat diterapkan dalam kegiatan operasional UMKM.

Kemampuan pencatatan transaksi berbasis ESG dievaluasi melalui pemeriksaan lembar latihan peserta dengan memperhatikan lima komponen, yaitu tanggal transaksi, jenis transaksi, pemasukan, pengeluaran, dan keterangan ESG. Pemeriksaan juga mencakup kesesuaian penandaan dimensi Environmental (E), Social (S), atau Governance (G) dengan karakteristik aktivitas usaha yang dicatat. Penilaian diarahkan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mendokumentasikan transaksi secara terstruktur dan menghubungkannya dengan praktik keberlanjutan tanpa melakukan pencatatan ganda pada transaksi yang sama.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui perbandingan hasil penilaian mandiri ESG sebelum dan sesudah pendampingan, pemeriksaan kelengkapan catatan transaksi, serta penilaian terhadap rencana aksi yang disusun peserta. Penilaian mandiri menggunakan 15 indikator dengan skor total 0–15 yang diklasifikasikan ke dalam kategori merah (0–7), kuning (8–12), dan hijau (13–15). Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif menggunakan frekuensi dan persentase untuk menggambarkan distribusi kategori ESG serta capaian penyusunan catatan transaksi dan rencana aksi. Sementara itu, skor penilaian mandiri disajikan menggunakan median dan rentang minimum–maksimum untuk menggambarkan kondisi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Evaluasi juga dilengkapi dengan pemeriksaan dokumen dan diskusi bersama peserta untuk mengidentifikasi kendala penerapan ESG serta menentukan kebutuhan pendampingan lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian dibahas melalui empat aspek utama, yaitu pemetaan praktik ESG pada UMKM, pelatihan pencatatan transaksi, penyusunan rencana aksi, dan evaluasi penggunaan instrumen. Keempat aspek tersebut menggambarkan proses edukasi dan pendampingan yang diarahkan pada kemampuan peserta menilai kondisi usaha serta mengenali tindakan perbaikan yang dapat diterapkan dalam operasional sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melibatkan partisipasi aktif pelaku UMKM di Kelurahan 3 Ilir, Kota Palembang, melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan pendampingan praktik penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Keterlibatan peserta diarahkan pada pengenalan kondisi usaha, pengisian instrumen penilaian mandiri, latihan pencatatan transaksi berbasis ESG, serta penyusunan rencana aksi perbaikan usaha. Dokumentasi kegiatan yang memperlihatkan interaksi antara tim pengabdian dan peserta selama pelaksanaan pendampingan disajikan pada Gambar 1.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan ESG pada Pelaku UMKM di Kelurahan 3 Ilir, Kota Palembang

Pemetaan awal praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi penerapan prinsip keberlanjutan pada kegiatan usaha peserta sebelum pelaksanaan pendampingan. Penilaian mencakup aspek lingkungan, seperti efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan limbah; aspek sosial, meliputi tanggung jawab terhadap pekerja, pelanggan, dan masyarakat; serta aspek tata kelola yang berkaitan dengan keteraturan pencatatan keuangan, transparansi, dan administrasi usaha. Melalui instrumen penilaian mandiri yang terdiri atas 15 indikator ESG, setiap peserta dapat mengidentifikasi praktik keberlanjutan yang telah diterapkan serta aspek yang masih memerlukan perbaikan. Penilaian kembali dilakukan setelah kegiatan pendampingan untuk mengevaluasi perubahan capaian peserta. Hasil evaluasi terhadap 30 pelaku UMKM mencakup perbandingan skor penilaian mandiri, distribusi kategori ESG, kemampuan menyusun rencana aksi pada ketiga dimensi, serta keterampilan membuat catatan transaksi berbasis ESG. Rekapitulasi hasil evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Penerapan ESG Sebelum dan Sesudah Pendampingan pada UMKM

Indikator Evaluasi	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan	Sumber Verifikasi
Peserta yang menyelesaikan penilaian mandiri 15 indikator ESG, n (%)	30 (100%)	30 (100%)	Lembar penilaian mandiri
Median skor ESG (minimum–maksimum)	6 (3–10)	12 (8–15)	Rekapitulasi skor ESG
Kategori merah, n (%)	22 (73,3%)	0 (0,0%)	Hasil penilaian mandiri
Kategori kuning, n (%)	8 (26,7%)	18 (60,0%)	Hasil penilaian mandiri
Kategori hijau, n (%)	0 (0,0%)	12 (40,0%)	Hasil penilaian mandiri
Peserta yang mampu menyusun rencana aksi pada tiga dimensi ESG, n (%)	2 (6,7%)	27 (90,0%)	Portofolio rencana aksi
Peserta yang mampu membuat catatan transaksi berlabel ESG, n (%)	3 (10,0%)	25 (83,3%)	Lembar pencatatan transaksi

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3, hasil penilaian mandiri menunjukkan adanya peningkatan skor ESG peserta setelah pelaksanaan pendampingan. Median skor meningkat dari 6 (rentang 3–10) sebelum kegiatan menjadi 12 (rentang 8–15) setelah kegiatan. Perubahan juga terlihat pada distribusi kategori penilaian, yaitu sebanyak 22 peserta (73,3%) berada dalam kategori merah dan 8 peserta (26,7%) dalam kategori kuning sebelum kegiatan. Setelah pendampingan, tidak terdapat

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

peserta dalam kategori merah, sedangkan 18 peserta (60,0%) berada dalam kategori kuning dan 12 peserta (40,0%) mencapai kategori hijau. Selain itu, jumlah peserta yang mampu menyusun rencana aksi pada ketiga dimensi ESG meningkat dari 2 peserta (6,7%) menjadi 27 peserta (90,0%).

Kemampuan menyusun catatan transaksi berlabel ESG juga menunjukkan peningkatan, dari 3 peserta (10,0%) menjadi 25 peserta (83,3%). Temuan tersebut menggambarkan perbaikan capaian penilaian mandiri serta kemampuan peserta dalam menggunakan instrumen pencatatan dan perencanaan ESG. Hasil ini sejalan dengan Shari et al. (2024) yang menekankan pentingnya pengetahuan dan kesadaran dalam penerapan ESG pada UMKM. Selain itu, Salvador et al. (2023) menjelaskan bahwa perbedaan tingkat kematangan keberlanjutan pada UMKM memerlukan pendekatan pendampingan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing usaha.

Ditinjau berdasarkan cakupan dimensi ESG, instrumen penilaian mandiri yang digunakan dalam kegiatan ini mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam satu pengukuran. Dimensi lingkungan mencakup praktik penggunaan bahan baku, pengurangan plastik sekali pakai, efisiensi energi, pengelolaan limbah, kebersihan lingkungan usaha, dan penggunaan peralatan ramah lingkungan. Dimensi sosial berkaitan dengan tanggung jawab terhadap pekerja, kontribusi kepada masyarakat, keterlibatan karyawan, serta pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Sementara itu, dimensi tata kelola meliputi keteraturan pencatatan keuangan, transparansi usaha, pemenuhan kewajiban administrasi, penerapan nilai kejujuran dan tanggung jawab, serta evaluasi operasional usaha. Perubahan capaian penilaian mandiri secara keseluruhan menunjukkan perkembangan pemenuhan indikator ESG setelah pendampingan. Meskipun demikian, hasil tersebut merepresentasikan skor agregat dari ketiga dimensi sehingga belum dapat menunjukkan kontribusi perubahan masing-masing dimensi secara terpisah. Oleh karena itu, interpretasi hasil perlu dibatasi pada peningkatan capaian penilaian mandiri secara keseluruhan dan perkembangan keterampilan praktis peserta yang tercermin dalam kemampuan pencatatan transaksi serta penyusunan rencana aksi ESG.

Pelatihan pencatatan transaksi berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan salah satu kegiatan pendampingan yang bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam pengelolaan keuangan usaha. Dalam pelaksanaannya, peserta diberikan pemahaman mengenai cara mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas transaksi berdasarkan tiga dimensi ESG tanpa mengubah prinsip dasar pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Pada dimensi lingkungan, peserta diperkenalkan pada pencatatan transaksi yang berkaitan dengan penggunaan peralatan hemat energi dan pengelolaan limbah usaha. Dimensi sosial mencakup pengeluaran untuk pelatihan keselamatan kerja karyawan dan kegiatan kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Sementara itu, dimensi tata kelola meliputi pencatatan penjualan serta pengadaan perlengkapan administrasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan usaha. Setiap transaksi dilengkapi dengan keterangan ESG dan bukti pendukung agar aktivitas yang berkaitan dengan keberlanjutan dapat diidentifikasi serta ditelusuri secara lebih sistematis. Dalam pelaksanaan pendampingan, peserta diberikan latihan pencatatan transaksi dengan menghubungkan aktivitas keuangan usaha dan dimensi ESG. Untuk memperjelas mekanisme pencatatan, digunakan contoh transaksi yang mencakup aktivitas lingkungan, sosial, dan tata kelola. Contoh tersebut disusun dalam format sederhana yang memuat tanggal, jenis transaksi, pemasukan, pengeluaran, serta keterangan ESG dan bukti pendukung yang relevan. Transaksi yang disajikan pada Tabel 4 merupakan contoh simulasi untuk keperluan pelatihan, bukan rekapitulasi transaksi aktual seluruh peserta. Penyajian ini bertujuan memperlihatkan cara mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas keuangan berdasarkan dimensi ESG tanpa mengubah prinsip dasar pencatatan transaksi usaha.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Tabel 4. Format latihan pencatatan transaksi dengan keterangan ESG

Tanggal	Aktivitas Transaksi	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Keterangan ESG dan Bukti
10/08/2026	Penjualan produk	1.250.000	–	G: Transparansi pencatatan penjualan; nota penjualan
11/08/2026	Pembelian lampu hemat energi	–	180.000	E: Efisiensi penggunaan energi; nota pembelian
12/08/2026	Pelatihan keselamatan kerja karyawan	–	125.000	S: Peningkatan keselamatan kerja; daftar hadir dan bukti pengeluaran
13/08/2026	Pembelian tempat sampah terpilah	–	95.000	E: Pengelolaan limbah usaha; nota pembelian
14/08/2026	Pembelian buku kas dan perlengkapan administrasi usaha	–	75.000	G: Keteraturan pencatatan dan akuntabilitas keuangan; nota pembelian
15/08/2026	Pemberian bantuan sembako kepada masyarakat sekitar	–	200.000	S: Kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat; dokumentasi penyerahan dan nota pembelian
Total		**1.250.000**	**675.000**	

Berdasarkan Tabel 4, pencatatan transaksi berbasis ESG memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara aktivitas keuangan dan penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasional UMKM. Keenam contoh transaksi yang disajikan mencakup dua aktivitas pada masing-masing dimensi ESG, dengan total pemasukan sebesar Rp1.250.000 dan pengeluaran sebesar Rp675.000. Pada dimensi lingkungan, pencatatan pembelian lampu hemat energi dan tempat sampah terpilah menunjukkan bagaimana pengeluaran usaha dapat dikaitkan dengan efisiensi sumber daya serta pengelolaan limbah. Pada dimensi sosial, pengeluaran untuk pelatihan keselamatan kerja dan bantuan kepada masyarakat mencerminkan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja serta tanggung jawab sosial.

Sementara itu, pencatatan penjualan produk dan pembelian perlengkapan administrasi merupakan contoh aktivitas yang mendukung keteraturan dokumentasi dan tata kelola keuangan. Pemberian keterangan ESG pada setiap transaksi membantu pelaku UMKM mengidentifikasi aktivitas yang berkaitan dengan keberlanjutan sekaligus memperkuat transparansi dan keterlacakan informasi keuangan. Hal ini sejalan dengan Galli et al. (2024) yang menekankan pentingnya hubungan antara praktik keberlanjutan dan pelaporannya. Selain itu, Appiah-kubi et al. (2025) Appiah-kubi et al. (2024) menunjukkan pentingnya kompetensi keberlanjutan dalam mendukung pemanfaatan digitalisasi untuk pelaporan keberlanjutan pada UMKM.

Penyusunan rencana aksi Environmental, Social, and Governance (ESG) merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan pendampingan untuk membantu pelaku UMKM menerjemahkan prinsip keberlanjutan ke dalam langkah operasional yang dapat diterapkan secara bertahap. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 27 dari 30 peserta (90,0%) telah mampu menyusun rencana aksi yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola, meningkat dibandingkan kondisi sebelum pendampingan yang hanya mencapai 2 peserta (6,7%). Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi kebutuhan perbaikan usaha serta merumuskan tindakan yang sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki. Penyusunan rencana aksi difokuskan pada penentuan kegiatan prioritas, penetapan indikator pemantauan, dan identifikasi bukti pendukung agar pelaksanaan prinsip ESG dapat dievaluasi secara lebih sistematis.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pada dimensi lingkungan, rencana aksi diarahkan pada pemantauan penggunaan energi dan air; dimensi sosial menekankan pengelolaan hubungan dengan pelanggan; sedangkan dimensi tata kelola difokuskan pada peningkatan keteraturan pencatatan dan pengawasan keuangan usaha. Contoh matriks rencana aksi yang digunakan dalam kegiatan pendampingan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks rencana aksi penerapan ESG bagi UMKM

Dimensi ESG	Tindakan Prioritas	Indikator Pemantauan	Bukti Pendukung
Environmental (E)	Melakukan pencatatan penggunaan listrik dan air setiap bulan	Tersedianya catatan penggunaan listrik dan air secara bulanan	Catatan penggunaan, foto meter, dan tagihan
Social (S)	Menyediakan mekanisme pencatatan dan penanganan keluhan pelanggan	Jumlah keluhan yang dicatat dan ditindaklanjuti	Buku keluhan dan dokumentasi tindak lanjut
Governance (G)	Melakukan pencatatan transaksi dan rekonsiliasi kas secara mingguan	Kesesuaian catatan kas dengan bukti transaksi	Buku kas, nota, dan bukti transaksi

Berdasarkan Tabel 5, rencana aksi pada ketiga dimensi ESG dirancang untuk mendukung penerapan praktik keberlanjutan melalui kegiatan sederhana yang dapat dilaksanakan dan dipantau oleh pelaku UMKM. Pada dimensi Environmental, pencatatan penggunaan listrik dan air secara berkala dapat membantu pemilik usaha mengidentifikasi pola konsumsi sumber daya dan menentukan peluang peningkatan efisiensi operasional. Pada dimensi Social, penyediaan mekanisme penanganan keluhan pelanggan menjadi bagian dari upaya memperkuat tanggung jawab sosial, meningkatkan responsivitas pelayanan, dan membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Sementara itu, pada dimensi Governance, pencatatan transaksi dan rekonsiliasi kas secara mingguan dapat mendukung ketertiban administrasi, transparansi keuangan, serta akuntabilitas pengelolaan usaha. Ketiga bentuk tindakan tersebut menunjukkan bahwa penerapan ESG dapat diintegrasikan ke dalam aktivitas operasional UMKM melalui langkah yang realistis tanpa memerlukan sistem pengelolaan yang kompleks.

Pentingnya penggabungan penyampaian materi dan latihan praktis juga didukung oleh (chröder et al. (2023), yang mengkaji pengembangan kompetensi tindakan keberlanjutan melalui pelatihan pada usaha kecil dan menengah. Dalam konteks kegiatan pengabdian ini, latihan penyusunan rencana aksi memberikan kesempatan kepada peserta untuk menerjemahkan konsep ESG menjadi tindakan prioritas, indikator pemantauan, dan bukti pendukung yang dapat digunakan dalam pengelolaan usaha. Meskipun demikian, hasil evaluasi kegiatan ini masih terbatas pada kemampuan penyusunan dokumen dan belum mengukur konsistensi pelaksanaan rencana aksi dalam jangka panjang.

Hasil pendampingan ini sejalan dengan Cicchini et al. (2024) yang membahas tantangan kompleksitas praktik pelaporan keberlanjutan pada UMKM. Setyaningsih et al. (2024) juga menekankan bahwa keterbatasan sumber daya dan kapasitas organisasi menjadi tantangan dalam penerapan pelaporan keberlanjutan. Selain itu, Zaman et al. (2025) menyoroti pentingnya memahami praktik keberlanjutan berdasarkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing UMKM. Dalam konteks kegiatan pengabdian ini, peningkatan jumlah peserta yang mampu menyusun rencana aksi menunjukkan perkembangan keterampilan dalam merencanakan penerapan ESG secara lebih terarah. Meskipun demikian, keberhasilan penyusunan rencana aksi perlu diikuti dengan konsistensi pelaksanaan dan pemantauan berkala agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pengelolaan usaha.

Bukti keterampilan praktis peserta dalam kegiatan pendampingan dievaluasi melalui lembar pencatatan transaksi dan dokumen rencana aksi ESG yang disusun selama kegiatan. Hasil pemeriksaan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

menunjukkan bahwa 25 dari 30 peserta (83,3%) mampu membuat catatan transaksi dengan keterangan ESG, sedangkan 27 peserta (90,0%) mampu menyusun rencana aksi pada ketiga dimensi ESG. Format pencatatan pada Tabel 4 dan matriks rencana aksi pada Tabel 5 memperlihatkan komponen yang digunakan dalam latihan dan pendampingan, meliputi identifikasi aktivitas usaha, pengelompokan berdasarkan dimensi ESG, penentuan tindakan prioritas, indikator pemantauan, serta bukti pendukung. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan kemampuan peserta dalam menerjemahkan prinsip keberlanjutan menjadi dokumen operasional yang lebih terstruktur. Meskipun demikian, kemampuan menyusun dokumen belum dapat disamakan dengan keberhasilan pelaksanaan seluruh tindakan ESG dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan adanya peningkatan capaian penilaian mandiri ESG pada pelaku UMKM di Kelurahan 3 Ilir, Palembang, setelah mengikuti rangkaian penyuluhan dan pendampingan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 30 peserta, median skor ESG meningkat dari 6 sebelum kegiatan menjadi 12 setelah kegiatan. Perubahan ini juga terlihat pada distribusi kategori penilaian, di mana sebelum pendampingan terdapat 22 peserta (73,3%) dalam kategori merah dan 8 peserta (26,7%) dalam kategori kuning. Setelah kegiatan, seluruh peserta berada pada kategori kuning dan hijau, masing-masing sebanyak 18 peserta (60,0%) dan 12 peserta (40,0%). Hasil tersebut menunjukkan adanya perbaikan capaian penilaian mandiri ESG, terutama dalam pengenalan dan penerapan indikator keberlanjutan yang berkaitan dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola usaha.

Peningkatan capaian tersebut juga didukung oleh hasil evaluasi keterampilan praktis peserta. Jumlah pelaku UMKM yang mampu menyusun rencana aksi pada ketiga dimensi ESG meningkat dari 2 peserta (6,7%) menjadi 27 peserta (90,0%). Sementara itu, kemampuan membuat catatan transaksi dengan keterangan ESG meningkat dari 3 peserta (10,0%) menjadi 25 peserta (83,3%). Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hasil penilaian mandiri, tetapi juga dengan penguatan keterampilan peserta dalam mengidentifikasi aktivitas usaha, menyusun prioritas perbaikan, dan mendokumentasikan transaksi yang berkaitan dengan keberlanjutan. Pencapaian tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan pelatihan yang menggabungkan penyampaian materi dengan praktik langsung agar konsep ESG lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam pengelolaan UMKM.

Pelaksanaan pendampingan ESG melalui pendekatan partisipatif memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan materi keberlanjutan dengan aktivitas operasional usaha. Penggunaan instrumen penilaian mandiri, format pencatatan transaksi sederhana, dan matriks rencana aksi menjadi komponen yang mendukung proses pembelajaran karena peserta dapat mempraktikkan secara langsung materi yang diberikan. Di sisi lain, penerapan ESG pada UMKM berpotensi menghadapi kendala yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, keterampilan administrasi, dan konsistensi pencatatan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Oleh karena itu, keberhasilan pendampingan tidak hanya bergantung pada pemahaman konsep ESG, tetapi juga pada kemampuan peserta mempertahankan praktik pencatatan, melaksanakan rencana aksi, dan melakukan evaluasi secara berkala setelah kegiatan berakhir. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya instrumen yang sederhana dan pendampingan lanjutan agar penerapan ESG dapat disesuaikan dengan kapasitas masing-masing usaha.

Dari perspektif literatur, Gallagher et al. (2026) mengidentifikasi peran kapasitas sumber daya internal dan tekanan eksternal dalam mendorong maupun menghambat penerapan praktik pengelolaan lingkungan pada UMKM. Kraus et al. (2026) juga membahas tantangan pelaporan keberlanjutan yang berkaitan dengan kompleksitas persyaratan, kompetensi, dan sistem pengumpulan informasi. Sementara itu Kharde et al. (2026), menunjukkan keterkaitan berbagai hambatan organisasi, finansial, informasi, dan regulasi dalam pelaporan keberlanjutan UMKM. Ketiga kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami pentingnya penyederhanaan instrumen dan pendampingan yang sesuai dengan kapasitas peserta. Namun, faktor-faktor tersebut diposisikan sebagai pembanding

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

literatur dan tidak secara langsung dianggap sebagai kendala yang terbukti dialami seluruh peserta kegiatan pengabdian ini.

Dari perspektif keberlanjutan usaha, penerapan penilaian mandiri, pencatatan transaksi, dan penyusunan rencana aksi memberikan dasar bagi pelaku UMKM untuk mengintegrasikan prinsip ESG secara lebih sistematis ke dalam kegiatan operasional. Hal ini sejalan dengan Setyaningsih et al. (2024) yang menekankan pentingnya penyederhanaan praktik pelaporan keberlanjutan agar sesuai dengan kapasitas dan sumber daya UMKM. Selain itu, Salvador et al. (2023) menunjukkan bahwa tingkat kematangan keberlanjutan pada UMKM berkaitan dengan kemampuan usaha dalam mengembangkan dan menerapkan praktik keberlanjutan secara bertahap. Dengan demikian, pendampingan yang menggabungkan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk memperkuat kesiapan UMKM dalam menjalankan usaha yang lebih bertanggung jawab.

Perubahan capaian peserta setelah pendampingan menunjukkan bahwa penguatan pemahaman ESG yang disertai latihan praktis dapat membantu pelaku UMKM mengidentifikasi aspek keberlanjutan dan menyusun dokumen pendukung secara lebih sistematis. Peningkatan median skor penilaian mandiri dari 6 menjadi 12, disertai peningkatan kemampuan penyusunan rencana aksi dan pencatatan transaksi, mengindikasikan adanya perkembangan kapasitas peserta pada aspek yang dievaluasi. Temuan ini relevan dengan Setyaningsih et al. (2024) yang menyoroti pentingnya penyederhanaan praktik pelaporan keberlanjutan bagi UMKM serta Cicchini et al. (2024) yang membahas tantangan penerapan pelaporan keberlanjutan pada usaha berskala kecil dan menengah. Selain itu, Salvador et al. (2023) menekankan keterkaitan antara kematangan keberlanjutan dan pengembangan praktik usaha secara bertahap. Berbeda dari kajian tersebut yang memberikan landasan mengenai tantangan dan perkembangan keberlanjutan UMKM, kegiatan pengabdian ini memperlihatkan penerapan operasional melalui integrasi penilaian mandiri, latihan pencatatan transaksi, dan penyusunan rencana aksi dalam satu rangkaian pendampingan. Meskipun demikian, perubahan yang diamati masih terbatas pada hasil penilaian mandiri dan kemampuan penyusunan dokumen sehingga belum dapat ditafsirkan sebagai bukti perubahan kinerja lingkungan, sosial, maupun keuangan usaha dalam jangka panjang.

Meskipun hasil evaluasi menunjukkan perkembangan positif, keberlanjutan penerapan ESG memerlukan komitmen dan konsistensi pelaku usaha setelah kegiatan pendampingan berakhir. Peningkatan skor penilaian mandiri dan kemampuan menyusun dokumen merupakan capaian awal yang mencerminkan penguatan kapasitas peserta, tetapi belum secara langsung menunjukkan perubahan jangka panjang terhadap efisiensi energi, kesejahteraan pekerja, maupun kinerja keuangan usaha. Momtaz & Parra (2025) menunjukkan adanya hubungan positif antara pengungkapan informasi ESG dan kinerja keuangan UMKM dalam konteks penelitian mereka. Temuan tersebut memperkuat relevansi penerapan ESG sebagai bagian dari strategi pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Namun demikian, manfaat ekonomi jangka panjang dari penerapan ESG pada peserta kegiatan pengabdian ini belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan hasil pendampingan selama satu bulan. Oleh karena itu, tindak lanjut diperlukan melalui penguatan konsistensi pencatatan transaksi, pemantauan realisasi rencana aksi, serta evaluasi berkala terhadap perubahan praktik usaha pada setiap dimensi ESG. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan praktik bisnis yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan 3 Ilir, Kota Palembang, menunjukkan peningkatan capaian penilaian mandiri ESG dan keterampilan administrasi pelaku UMKM setelah mengikuti penyuluhan dan pendampingan. Evaluasi terhadap 30 peserta menunjukkan peningkatan median skor penilaian mandiri ESG dari 6 menjadi 12, dengan 18 peserta (60,0%) berada pada kategori kuning dan 12 peserta (40,0%) pada kategori hijau setelah pendampingan. Kemampuan menyusun rencana aksi pada ketiga dimensi ESG meningkat dari 6,7% menjadi 90,0%, sedangkan kemampuan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

membuat catatan transaksi berlabel ESG meningkat dari 10,0% menjadi 83,3%. Capaian tersebut menunjukkan perkembangan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi kondisi usaha, mendokumentasikan transaksi yang berkaitan dengan ESG, serta menyusun prioritas perbaikan secara lebih terstruktur. Secara praktis, kegiatan ini memberikan pendekatan pendampingan sederhana yang dapat digunakan UMKM untuk mengintegrasikan penilaian mandiri, pencatatan transaksi, dan perencanaan keberlanjutan ke dalam pengelolaan usaha. Meskipun demikian, hasil evaluasi masih terbatas pada capaian penilaian mandiri dan keterampilan penyusunan dokumen sehingga belum membuktikan perubahan kinerja lingkungan, sosial, maupun tata kelola dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan berkala terhadap konsistensi pencatatan transaksi, realisasi rencana aksi, dan perkembangan pemenuhan indikator ESG, disertai pendampingan lanjutan untuk mendukung keberlanjutan penerapan praktik ESG sesuai kapasitas masing-masing UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada para pelaku UMKM dan pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan 3 Ilir, Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Appiah-kubi, E., Dura, C. C., Nita, D., Driga, I., Preda, A., & Baltador, L. A. (2025). The effect of digitalization on sustainability reporting: The role of sustainability competence, green knowledge integration, and stakeholder pressure. Business Strategy and the Environment, 34(August), 1133–1153. https://doi.org/10.1002/bse.4024

Appiah-kubi, E., Koranteng, F. O., Dura, C. C., Mihaila, A. A., Driga, I., & Preda, A. (2024). Green Financing and Sustainability Reporting Among SMEs: The Role of Pro-environmental Behavior and Digitization. *Journal of Cleaner Production*, *478*(20), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143939

Castilla-Polo, F., Licerán-Gutiérrez, A., & Guerrero-Baena, M. D. (2026). SMEs in the reputation literature: A review of the state-of-the-art. *Review of Managerial Science, 20*(5), 1541–1581. https://doi.org/10.1007/s11846-025-00915-9

Cicchini, D., Cotana, M. L., Filocamo, M. R., & Galeotti, R. M. (2024). Sustainability Reporting Practices in SMES. A Systematic Study and Future Avenues. *Rivista Piccola Impresa/Small Business*, *1*(2), 104–134. https://doi.org/10.14596/pisb.4022

de Souza, L. C. G., Guimaraes, L. P., & Drumond, M. A. (2026). Sustainability Assessment of Micro, Small, and Medium Enterprises: A Systematic Review and Hybrid Architecture for Credible, Salient, and Legitimate Knowledge Governance. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, *2*(1), 1–22. https://doi.org/10.1002/csr.70721

Gallagher, P., Arlı, N. B., Arsoy, A. P., & Quinn, U. (2026). Understanding ESG Adoption in SMEs: A Cross-Country Qualitative Study Using Activity Theory. *Sustainability (Switzerland)*, *18*(2849), 1–23. https://doi.org/10.3390/su18062849

Galli, D., Torelli, R., & Caccialanza, A. (2024). Sustainability performance and sustainability reporting in SMEs: a love affair or a fight ? *Journal of Management & Organization*, *30*(2), 574–599. https://doi.org/10.1017/jmo.2023.40

Guerrero-baena, M. D., Castilla-polo, F., & Rodríguez-gutiérrez, P. (2024). What are the main drivers of SMEs' production of sustainability reports? *Small Business International Review*, *8*(6), 1–13. https://doi.org/10.26784/sbir.v8i1.617

Kharde, Y., Barge, P., & Havale, D. S. (2026). Structuring barriers to sustainability reporting among Indian SMEs with implications for sustainable development goals. *Discover Sustainability*, *14*(2), 1–28. https://doi.org/10.1007/s43621-026-05244-9

Kraus, P., Braun, F., Schlegel, D., & Feierabend, D. (2026). Sustainability reporting in SMEs: an examination of challenges. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, *12*(November), 1985–

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

2517. https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2026-0047

Martins, A., Branco, M. C., Melo, P. N., & Machado, C. (2022). Sustainability in Small and Medium-Sized Enterprises: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(6493), 1–26. https://doi.org/10.3390/su14116493

Momtaz, P. P., & Parra, I. M. (2025). Is sustainable entrepreneurship profitable? ESG disclosure and the financial performance of SMEs. *Small Business Economics*, *64*(4), 1535–1564. https://doi.org/10.1007/s11187-024-00981-5

Ortiz-Martinez, E., & Marin-Hernandez, S. (2024). Sustainability Information in European Small-and Medium-Sized Enterprises. *Journal of the Knowledge Economy*, *15*(1), 7497–7522. https://doi.org/10.1007/s13132-023-01386-7

Radyati, M. R. N. (2025). *Panduan ESG untuk UKM*. PT Cendekia Edukasi Citra Tritunggal.

Salvador, R., Soberg, P. V., Jorgensen, M. S., Schmidt-Kallesoe, L.-L., & Larsen, S. B. (2023). Explaining sustainability performance and maturity in SMEs–Learnings from a 100-participant sustainability innovation project. *Journal of Cleaner Production*, *419*(June), 1–16. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138248

Schröder, S., Wiek, A., Farny, S., & Luthardt, P. (2023). Toward holistic corporate sustainability—Developing employees' action competence for sustainability in small and medium-sized enterprises through training. *Business Strategy and the Environment*, *32*(June), 1650–1669. https://doi.org/10.1002/bse.3210

Sendawula, K., Turyakira, P., Akileng, G., & Vincent, B. (2024). Environmental knowledge, regulatory compliance mechanisms, and environmental sustainability practices of manufacturing small and medium enterprises (SMEs) in Uganda. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, *13*(75), 1–19. https://doi.org/10.1186/s13731-024-00426-z

Setyaningsih, S., Widjojo, R., & Kelle, P. (2024). Challenges and Opportunities in Sustainability Reporting: A Focus on Small and Medium Enterprises (SMEs). *Cogent Business & Management*, *11*(1), 1–18. https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2298215

Shari, W., Abu Hassan, M. H., Mohd Subri, M. S. B., & Abdul Wahab, N. M. (2024). Determinants of environmental, social, and governance (ESG) practices among Malaysian small and medium enterprises (SMEs). *Journal of Economic Cooperation and Development*, *45*(4), 55–86. https://doi.org/10.5281/zenodo.16881787

Zaman, M., Tanewski, G., & Ekanayake, G. (2025). What Does Sustainability Mean for Small and Medium Enterprises: A Systematic Literature Review. *Journal of Cleaner Production*, *492*(12), 1–32. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.144830

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license